

SKRIPSI

**PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI SERUNI DI KABUPATEN BANTAENG
(PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)**

MATSELL PRIANUGRAH MALLU

E211 16 509



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRAK

**Matsell Prianugrah Mallu (E211 16 509), Pengelolaan Reklamasi Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng (Perspektif *Sustainable Development*).
Dibimbing oleh Prof. Dr. Rakhmat, MS dan Dr. Hamsinah, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan reklamasi Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng (Perspektif *Sustainable Development*). Penelitian ini menggunakan Teori James A. F Stoner dalam (Effendi, 2015).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dan adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode (1) wawancara, (2) observasi dan (3) dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan reklamasi Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng cukup baik berdasarkan perspektif *sustainable development*, dengan melihat : (1) Dalam perencanaan, Visi misi Bappeda merujuk pada Visi misi Kabupaten Bantaeng dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan reklamasi pantai seruni sesuai dengan konsep *sustainable development*; (2) Dalam pengorganisasian, penempatan kerja sudah sesuai dengan keahlian sumber daya manusia serta koordinasi yang baik dengan dinas terkait dalam pengelolaan reklamasi pantai seruni; (3) Dalam kepemimpinan, gaya kepemimpinan yang adil dan menjadikan bawahan sebagai mitra kerja dapat dikatakan baik serta peran Bappeda sebagai *leading sector* sudah dilakukan dengan baik; (4) Dalam pengawasan, pengawasan internal yang dijalankan dapat dikatakan efektif, partisipasi masyarakat dalam pengawasan kurang aktif dikarenakan sudah merasakan manfaat pengelolaan reklamasi pantai seruni, pengawasan Bappeda dalam pengelolaan reklamasi pantai seruni masih kurang baik dikarenakan masih banyak pengunjung dan pelaku usaha mengeluhkan beberapa masalah di kawasan pantai seruni.

Kata Kunci : Pengelolaan, *Sustainable Development*



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Matsell Pri Nugrah Mallu (E211 16 509), Seruni Beach Reclamation Management in Bantaeng Regency (Sustainable Development Perspective). Supervised by prof. Dr. Rakhmat, MS and Dr. Hamsinah, M.Si

This study aims to determine the management of Seruni Beach reclamation in Bantaeng Regency (Sustainable Development Perspective). This research used James A. F Stoner's theory in (Effendi, 2015).

The method used in this study is qualitative research methods and the data collection techniques in this study using (1) interviews, (2) observation and (3) documentation.

The results show that the management of Seruni Beach reclamation in Bantaeng Regency is quite good based on the perspective of sustainable development, by looking at: (1) In planning, the vision and mission of Bappeda refers to the vision and mission of Bantaeng Regency in carrying out its main duties and functions as well as managing the reclamation of the seruni beach according to the concept sustainable development; (2) In organizing, the work placement is in accordance with the expertise of human resources as well as good coordination with related agencies in the management of seruni beach reclamation; (3) In leadership, a fair leadership style that makes subordinates work partners can be said good and the role of Bappeda as the leading sector has been carried out good; (4) In supervision, the internal supervision that is carried out can be said effective, community participation in supervision is less active because they have felt the benefits of seruni beach reclamation management, supervision of Bappeda in managing the reclamation of Seruni beach is still not good because there are still many visitors and business actors complaining of several problems in seruni beach area.

Keywords: Management, Sustainable Development



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MATSELL PRIANUGRAH MALLU

N I M : E211 16 509

Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Judul Skripsi : PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI SERUNI DI KABUPATEN BANTAENG (*PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI SERUNI DI KABUPATEN BANTAENG (*PERSPEKTIF SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip ataupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.



Makassar, 4 November 2020

MATSELL PRIANUGRAH MALLU

E211 16 509



UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

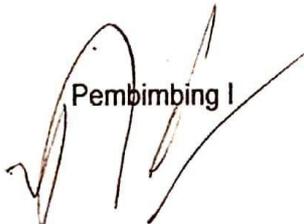
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama : MATSEL PRIANUGRAH MALLU
NIM : E211 16 509
Program studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI SERUNI DI
KABUPATEN BANTAENG (*PERSPEKTIF
SUSTAINABLE DEVELOPMENT*)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II, dan dinyatakan layak untuk Ujian Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, 04 November 2020


Pembimbing I

Prof. Dr. Rakhmat, MS.

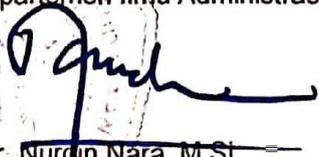
NIP 19630520 198702 1002

Pembimbing II



Dr. Hamsinah, M.Si

NIP 19551103 198702 2001

Mengetahui :
Ketua Departemen Ilmu Administrasi,

Dr. Nurdin Nara, M.Si.
NIP 19630903 198903 1002





UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Saya bertandatangan dibawah ini:

Nama : MATSELL PRIANUGRAH MALLU
NIM : E211 16 509
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul : PENGELOLAAN REKLAMASI PANTAI SERUNI DI
KABUPATEN BANTAENG (PERSPEKTIF *SUSTAINABLE
DEVELOPMENT*)

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan telah sesuai dengan saran tim Penguji Skripsi. Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang : Prof. Dr. Rakhmat, MS (.....)
Sekertaris Sidang : Dr. Hamsinah, M.Si. (.....)
Anggota : 1. Dr. Muhammad Yunus, MA. (.....)
2. Dr. Syahribulan, M.Si. (.....)

Kata Pengantar

Syalom

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menulis dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Reklamasi Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng (Perspektif *Sustainable Development*)”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini bisa selesai bukan karena tekad dan perjuangan penulis semata, melainkan karena pertolongan dan penyertaan Tuhan yang begitu berarti dalam hidup ini. Penulis percaya jika setiap masalah, Tuhan beri jalan keluar. Setiap pergumulan, Tuhan ganti dengan sukacita dan setiap air mata, Tuhan akan ganti dengan kebahagiaan. Saat penulis meminta yang baik, Tuhan selalu memberikan yang terbaik.

Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kesalahan baik secara teknis maupun non teknis. Berbagai kesulitan dan kerumitan terjadi dalam proses penulisan skripsi ini namun karena adanya dukungan, doa, serta bantuan dari orang-orang terdekat memungkinkan penulis untuk lebih semangat dalam mengerjakan skripsi ini, karena penulis percaya bahwa Tuhan selalu menuntun jalan bagi orang yang berusaha dan percaya.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua terkasih Ayahanda tercinta Debrin Mallu dan Ibunda Tercinta Ester Solang, tidak ada lagi kata yang mampu menuliskan betapa besar rasa terima kasih penulis untuk kalian. Yakinkanlah bahwa sejeli apapun kamu mencarinya, tak akan pernah ditemukan patah hati dari cinta yang mereka beri. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, doa, dukungan, bahkan jerih lelah serta tentunya didikan yang telah diberikan kepada penulis hingga saat ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang membalasnya berlipat kali ganda serta dikaruniakan selalu berkat, panjang umur, rahmat, dan kesehatan dari pada-Nya. Amin.

Pembuatan skripsi ini tentunya tidak luput dari bantuan berbagai pihak yang diberikan secara langsung ataupun tidak langsung kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, teruntuk kepada :

1. Prof. Dr. Rakhmat, MS, selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus dosen Pembimbing I penulis, yang selalu memberi motivasi, arahan dan dukungan dalam proses akademik dan penulisan skripsi ini.
2. Dr. Hamsinah, M.Si. selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan masukan serta motivasi selama penulis menyusun skripsi ini.
3. Dr. Muhammad Yunus, MA. dan Dr. Syahribulan, M.Si selaku dosen sekaligus tim penguji pada ujian proposal dan skripsi yang telah memberi masukan serta saran dalam perbaikan skripsi penulis.
4. Para Dosen dan Staff Akademik Departemen Ilmu Administrasi Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama masa perkuliahan.
5. Terima kasih kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng yang sudah menyambut hangat dan memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian, dan terimakasih yang sangat tak ternilai atas bantuan selama penelitian yang diberikan kepada penulis.
6. Terima kasih untuk kakak tercinta Esrin Mambe, Lindri Satriani dan Lasni Betria atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang diberikan. Tuhan Yesus Memberkati.
7. Seluruh keluarga besar penulis di mana pun kalian berada, terimakasih atas dukungan doa dan motivasi yang diberikan selama ini. Tuhan Yesus memberkati.
8. Terima Kasih buat Keluarga Besar PMKO FISIP UNHAS tanpa terkecuali, atas rasa kepedulian dan kekeluargaan yang sangat erat yang dibangun selama ini, teruslah menjadi garam dan terang di manapun kalian berada, Tuhan Yesus Memberkati.

9. Untuk Pengurus PMKO FISIP UNHAS Periode 2018/2019 terima kasih atas segala pelayanan, kesabaran dan kekompakan selama proses kepengurusan. Tetaplah jadi berkat dan pelayan bagi Tuhan, tetap menyebarkan kasih di manapun kalian berada, Tuhan Yesus Memberkati.
10. Keluarga Besar HUMANIS FISIP UNHAS. Kanda-kanda RELASI 2012, RECORD 2013, UNION 2014, CHAMPION 2015, adik-adik LEADER 2017, LENTERA 2018 dan MIRACLE 2019, yang sudah memberikan pengalaman berharga selama berorganisasi di kampus, semoga sukses selalu.
11. Terima kasih Departemen Advokasi dan Pengabdian Masyarakat (Adera) Periode 2018/2019 atas pengalaman dan kerjasamanya dalam kepengurusan, semoga sukses selalu.
12. Terima kasih untuk Unit Kegiatan Bulu Tangkis (UKMB) Universitas Hasanuddin dalam penyaluran hobby dan proses organisasi di kampus, untuk kakak-kakak dan teman-teman pengurus semoga selalu diberikan berkat dari Tuhan. Jaya terus UKMB Unhas.
13. Teruntuk saudara-saudariku, Friendship Generation Of Administration Departemen 2016 (FRAME 16) yang penulis cintai dan banggakan selalu, terima kasih telah memberi warna dalam dunia kampus, bersama kalian penulis merasakan keluarga baru dengan segala cerita yang penuh dengan suka maupun duka, canda tawa, kebersamaan. Jadilah Frame sejati, sukses selalu dan semoga kalian wisuda tepat pada waktunya.
14. Teruntuk saudara-saudariku, Selebrasi'24. Terima kasih telah menjadi keluarga dalam kehidupan berorganisasi.
15. Untuk para sahabat (Samir, Lukman, Haswan, Yuli, Sidar, Lilis) dimanapun kalian berada, segala bentuk rasa terima kasih dan bangga pernah mengenal kalian. Doa yang baik selalu saya haturkan untuk kalian yang selalu ada.
16. Teman-teman KKN Gelombang 102, Posko Apala, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone (Mila, Kifli, Monica, Nurul, Ikram, Yayat, Diya, Ridha Eca dan Kak Fadly) ,terima kasih pernah menjadi rekan kerja yang sampai saat ini dan nanti telah menjadi keluarga. Ada

banyak tantangan dan masa depan yang baik, tapi percayalah ada waktu dimana Tuhan memulihkan keadaan kita dengan cara membuat kita jatuh lalu membangkitkan kita kembali. Doa yang baik selalu saya haturkan untuk kalian yang selalu ada

17. Untuk Winnie Thalia, seseorang yang selalu menjadi penyemangat penulis. Percayalah bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong dan memulihkan mu apapun situasi dan kondisi yang dialami. Terima kasih atas semuanya, *God Bless You*.

Serta semua pribadi, kelompok dan pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik dalam proses akademik dan perkuliahan maupun dalam proses penyusunan skripsi ini. Atas segala doa, semangat, dorongan, dukungan, motivasi, atau apapun itu dan dalam bentuk apapun itu, sekali lagi penulis mengucapkan banyak terima kasih, kiranya Tuhan Yang Maha Esa yang melihat dan berkenan membalasnya berlipat kali ganda.

Penulis menyadari banyak kesalahan serta kekurangan dalam penulisan karya tulis ini, karena itu dengan senang hati penulis menerima saran atau pun kritik yang membangun guna menyempurnakan segala kesalahan yang ada.

Makassar,

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
Kata Pengantar	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	9
I.3 Tujuan Penelitian	9
I.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
II.1. Konsep Manajemen	10
II.1.1 Pengertian Manajemen	10
II.1.2 Asas Manajemen.....	13
II.1.3 Fungsi Manajemen.....	17
II.1.4 New Public Manajemen.....	20
II.2 Desentralisasi	22
II.3 Reklamasi	24
II.4 Sustainable development (Pembangunan Berkelanjutan)	26
II.4.1 Pengertian <i>Sustainable development</i> (Pembangunan berkelanjutan). 26	

II.4.2 Tujuan dan Target <i>Sustainable Development</i> (Pembangunan Berkelanjutan).....	27
II.4.3 Pilar Sustainable development (Pembangunan Berkelanjutan)	34
II.5 Kerangka Pikir	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN	38
III.1 Pendekatan Penelitian	38
III.2 Tipe Penelitian.....	38
III.3 Lokasi Penelitian.....	39
III.4 Definisi Operasional.....	39
III.5 Unit Analisis	40
III.6 Sumber Data	40
III.7 Narasumber atau Informan	41
III.8 Teknik Pengumpulan Data.....	41
III.9 Teknik Analisis Data	42
BAB IV	45
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	45
IV.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
IV.1.1 Profil Kabupaten Bantaeng	45
IV.1.2 Letak dan Kondisi Geografis.....	46
IV.1.3 Visi, Misi Kabupaten Bantaeng.....	52
IV.2 Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).....	58
IV.2.1 Tugas dan Fungsi Bappeda Bantaeng.....	58
IV.2.2 Stuktur Organisasi Bappeda Bantaeng.....	59
IV.2.3 Uraian Tugas Jabatan Struktur Bappeda Bantaeng	59
IV.2.4 Kondisi Kepegawaian.....	78
BAB V	81
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
V.1 Planning	81
V.1.1 Dasar Kebijakan.....	82
V.1.2 Arah Sustainable Development	84

V.2 Organizing	92
V.2.1 Penempatan Kerja.....	92
V.2.2 Koordinasi dengan Dinas Terkait.....	93
V.3 Leading	95
V.3.1 Gaya Kepemimpinan.....	95
V.3.2 Peran Bappeda sebagai <i>Leading Sector</i>	97
V.4 Controlling	98
V.4.1 Pengawasan Internal.....	98
V.4.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan.....	99
V.4.3 Pengawasan Bappeda dalam Pengelolaan Reklamasi Pantai Seruni	100
BAB VI	104
PENUTUP	104
VI.1 Kesimpulan	104
VI.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir	38
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Bantaeng.....	48
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bappeda Bantaeng	59
Gambar 5.1 Tujuan Sustainable Development.....	84
Gambar 5.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Bantaeng	85
Gambar 5.3 Klasifikasi dan Luas Wilayah terdampak Beberapa Jenis Bencana yang terjadi di Kabupaten Bantaeng	87

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel IV.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng 2017	48
Tabel IV.2 Jumlah Penduduk, Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 (Semester II)	49
Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin per Kecamatan Kabupaten Bantaeng Tahun 2018 (Semester II)	50
Tabel IV.4 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Bantaeng Menurut Jenis Kelamin Tahun 2018	79
Tabel IV.5 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Bantaeng Menurut Golongan Pangkat Tahun 2018	79
Tabel IV.6 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Bantaeng Menurut Jabatan Struktural Tahun 2018	80
Tabel 5.1 Tingkat Pendapatan Pemilik Usaha Pantai Seruni Sebelum Revitalisasi	86
Tabel 5.2 Tingkat Pendapatan Pemilik Usaha Pantai Seruni Setelah Revitalisasi	86
Tabel 5.3 Sistem Perparkiran Kawasan Reklamasi Pantai Seruni	100

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara-negara peserta Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat menyepakati Agenda 2030 sebagai agenda global pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia yang hadir telah menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul "*Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable development*", berisi uraian tentang 17 Tujuan dan 169 Target yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030. Dokumen ini dikenal dengan istilah *Sustainable development Goals*. Konsep *Sustainable development* atau Pembangunan Berkelanjutan pertama kali diperkenalkan sebagai tujuan sosial pada konferensi pertama PBB dalam bidang Lingkungan Hidup Stocklom pada tahun 1972. Ketika seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) secara bulat menyetujui Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan dan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada akhir September 2015, Sampai akhirnya Laporan Komisi Brundtland tahun 1987 berhasil meyakinkan bahwa pembangunan berkelanjutan bukanlah pilihan, tetapi itu adalah kewajiban seluruh Negara untuk menjaga kelestarian bumi. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan ,sumber daya alam adalah milik generasi anak dan cucu, generasi masa kini hanyalah meminjam dan bukan menghancurkan (Santoso, 2019:9-10)

Di Indonesia, konsep kebijakan pembangunan berdasarkan kepada Undang-Undang dasar 1945. Konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia

telah masuk pada amandemen UUD 45 yang keempat pada tanggal 10 Agustus 2002. Dalam pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” dan juga dan juga diterbitkannya Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 Tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur negara dengan tuntutan mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksana tugas dan fungsi penyelenggara pemerintahan Negara dan pembangunan. Melalui reformasi di segala bidang memungkinkan melakukan langkah penyelamatan, pemulihan, pemantapan dan pengembangan pembangunan serta memperkuat kepercayaan diri untuk bangsa yang lebih maju (Sedarmayanti 2003).

Hoelman dkk (2018) Buku panduan *sustainable development goals* bagi pemerintah daerah menuliskan 17 *goals* atau tujuan *Sustainable development* (Pembangunan berkelanjutan) yaitu :

1. Menghapus kemiskinan
2. Menghapus kelaparan dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan
3. Kesehatan untuk semua umur
4. Pendidikan yang berkualitas dan merata
5. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan remaja perempuan
6. Ketersediaan air minum dan sanitasi untuk semua
7. Energi untuk semua

8. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan lapangan kerja layak
9. Infrastruktur yang kuat dan industrialisasi yang berkelanjutan
10. Menurunkan ketimpangan
11. Kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan
12. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan
13. Melawan perubahan iklim dan dampaknya
14. Konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam
15. Melindungi dan merestorasi ekosistem, dan perlindungan hutan
16. Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non-diskriminasi
17. Kerja sama internasional yang semakin kuat.

Salah satu tujuan dari *sustainable development* yaitu konservasi pemanfaatan laut, pesisir dan laut dalam demi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain seperti kota dan hunian yang inklusif, aman dan berkelanjutan serta melindungi dan merestorasi ekosistem dan perlindungan hutan diharapkan menjadi salah satu focus pembangunan Indonesia saat ini dengan melihat Indonesia sebagai Negara agraria dan poros maritim dunia. Sebagai wilayah peralihan darat dan laut yang memiliki keunikan ekosistem, dunia memiliki kepedulian terhadap wilayah ini, khususnya di bidang lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Secara historis, kota-kota penting dunia bertempat tidak jauh dari laut. Alasannya, kawasan ini memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, serta memudahkan terjadinya perdagangan antar daerah, pulau dan benua. Selain itu, wilayah pesisir juga merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar

air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove (Muttaqiena dkk, 2009).

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia diikat dan dipersatukan oleh lautan yang memiliki segudang kekayaan alam. Ditinjau dari letaknya Indonesia juga sangat strategis, baik dalam pencatutan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan pertahanan kelautan. Kondisi ini menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia dengan memiliki luas sekitar 5,8 juta KM dan garis pantai 18.700 ribu hektar (Mun'im, 2013). Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki pantai yang panjang kurang lebih 81.000 km, sehingga pesisir merupakan sumberdaya besar bagi Indonesia. Pulau-pulau yang dipisahkan oleh laut dan selat di Indonesia memiliki karakteristik yang dianggap sebagai pemersatu wilayah, sehingga menjadi ikatan bukan hanya sebagai suatu bangsa yang bersatu, tetapi juga dalam pengelolaan sumber dayanya.

Kay dalam Sugandi (2011) mengelompokkan pengertian wilayah pesisir dari dua sudut pandang yaitu dari sudut akademik keilmuandan sudut kebijakan pengelolaan. Dari sisi keilmuan Ketchum, mendefinisikan wilayah pesisir sebagai sabuk daratan yang berbatasan dengan lautan dimana proses dan penggunaan lahan di darat secara langsung dipengaruhi oleh proses lautan dan sebaliknya. Definisi wilayah pesisir dari sudut pandang kebijakan pengelolaan meliputi jarak tertentu dari garis pantai ke arah daratan dan jarak tertentu ke arah lautan. Definisi ini tergantung dari isu yang diangkat dan faktor geografis yang relevan dengan karakteristik bentang alam pantai. Pengelolaan wilayah pesisir menyangkut pengelolaan yang terus menerus mengenai penggunaan wilayah pesisir dan sumberdaya di dalamnya dari area yang telah ditentukan, dimana batas-batas secara politik biasanya dihasilkan melalui keputusan legislatif atau

eksekutif. Wilayah pesisir yang kaya aneka ragam hayati, perlu diatur mengenai kebijakannya yang harus *sustainable*, penyelenggaraan penataan ruang tersebut tentunya harus memperhatikan kondisi geografis, sosial budaya seperti demografi, sebaran penduduk, serta aspek potensial dan strategis lainnya. Hasil dari penyelenggaraan penataan ruang ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable development*) yang dapat memadukan pilar ekonomi, sosial budaya, lingkungan dan pemerataan pembangunan.

Undang- Undang Otonomi Daerah pada pasal 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah diberi kewenangan dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 24 Tahun 1992, tentang penataan ruang yang menjelaskan bahwa setiap daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengatur dalam penyelenggaraan penataan ruang. Maka dari itu, melalui hak otonomi daerah pemerintah daerah harus bisa mengelola sumber daya yang dimiliki, terkhusus daerah yang memiliki potensi sumber daya berbasis agraria dan laut demi terjaganya ekosistem dan sektor pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat serta model tata ruang yang diharapkan tidak berbenturan dengan kualitas alami dari laut terkhusus pesisir pantai. Namun sampai saat ini, wilayah laut yang tersedia tersebut belum mampu dikelola oleh masyarakat, hal ini lantaran kurangnya kualitas dan kapasitas masyarakat Indonesia sehingga tidak memiliki profesionalitas dalam mengelola kekayaan laut dengan maksimal. Kenyataan masyarakat belum mampu mengelola laut dengan maksimal akhirnya mendorong pentingnya pembangunan nasional dan daerah berbasis kelautan yang diharapkan pembangunan berbasis kelautan akan

mampu meningkatkan perekonomian nusantara khususnya daerah yang berbasis pada *Sustainable development*. Di sisi lain, pemerintah daerah harus bisa menghasilkan suatu perubahan karena hal ini didorong oleh kenyataan bahwa sejak pemberlakuan desentralisasi di Indonesia, dua pertiga nasib dan kualitas hidup warga, dalam praktiknya, sangat ditentukan oleh baik–buruknya kinerja pemerintah daerah, mulai dari soal kebersihan lingkungan, pengadaan sarana umum, pengembangan potensi alam menjadi pariwisata, pengadaan sarana penunjang ekonomi hingga kualitas sekolah dan pelayanan kesehatan. Kita semua tergantung pada tinggi–rendahnya mutu program pemerintah di daerah (Hoelman dkk, 2018:7)

Kabupaten Bantaeng adalah salah satu daerah tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan. Dikenal dengan daerah tiga dimensi yang memiliki laut, daratan dan pegunungan. Daerahnya terletak pada daerah pantai yang memanjang pada bagian barat dan timur sepanjang 21,5 kilometer. Sangat potensial untuk perkembangan perikanan terkhusus pariwisata yang dimana Kabupaten Bantaeng membuat terobosan besar pada Tahun 2009 sampai sekarang dengan mengadakan proyek reklamasi di kawasan Pantai Seruni Kabupaten Bantaeng yang kini menjelma menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Sulawesi Selatan. Salah satu titik wisata utama adalah Pantai Seruni. Pantai Seruni ini merupakan kawasan hasil reklamasi sepanjang satu setengah kilometer. Awalnya pantai ini kumuh, tak menarik, bahkan, menurut masyarakat setempat, menyeramkan. Oleh Mantan Bupati Bantaeng yaitu Nurdin Abdullah, pantai ini dibangun dan dikembangkan menjadi rapi dan cantik.

Dikutip dari media online detiknews (1 September 2016) “Pantai Seruni sebagai pusat kegiatan masyarakat. Alun-alun Bantaeng ,rumah sakit kelas

internasional RSUD Prof. Dr. Andi Makkatutu, restoran, warung makan, lapangan upacara, anjungan dan area *sport center* dibangun di pantai ini, di atas tanah hasil reklamasi. Namun di balik gemerlapnya serta keindahan pembangunan pantai seruni di atas tanah reklamasi, ada hal yang bisa mengancam kelestarian ekosistem dan pembangunan yang telah dikelola sampai saat ini”. Dikutip dari media online Tagar.id (6 Januari 2020) menuliskan “angin kencang mengakibatkan huruf T di *Big Letter* tulisan Pantai Seruni Bantaeng roboh pada Senin, 6 Januari 2019. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, H. Abdullah Taibe mengatakan, saat ini cuaca memang cukup ekstrem sehingga beberapa pohon dan bahkan properti pada sebuah bangunan bisa terangkat oleh lajunya angin”. Begitupun, pada tahun 2019, dikutip dari media online Sindonews.com (23 Januari 2019) menuliskan Pesisir pantai seruni Kabupaten Bantaeng alami abrasi yang mengakibatkan alat pembatas jalan di pinggiran pantai roboh. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantaeng pada saat itu, kondisi tersebut disebabkan oleh tingginya gelombang air laut di Pantai Seruni.

Hal tersebut merupakan permasalahan karena adanya ketidakseimbangan pembangunan di mana Tanaman Mangrove yang semestinya bisa menahan laju angin serta gelombang laut yang tinggi tidak terlihat di kawasan reklamasi pantai seruni. Hal ini berlawanan dengan tujuan *sustainable development* dimana Santoso (2019:84-91) mengemukakan diantara tujuan *sustainable development* yaitu melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati dimana target pada 2020 menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem perairan.

Proses perencanaan ,pengorganisasian, kepemimpinan serta pengawasan lebih menitikberatkan pada pembangunan insfrakstruktur tanpa melihat pembangunan alamiah keanekaragaman hayati terkhusus penyebaran hutan mangrove. Di sisi lain ,dikutip dari media online trotoar.id (25 Januari 2019) yang dimana pantai seruni dipenuhi sampah terkhusus sampah plastik. Santoso (2019:84) mengemukakan salah satu tujuan *sustainable development* yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan. Target 2020, yaitu mengelola dan melindungi ekosistem laut untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif dan target pada tahun 2025 ,mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, termasuk sampah laut. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah khususnya dinas terkait agar prinsip serta target *sustainable development* pada kawasan pesisir pantai, laut dan perairan.

Berdasarkan uraian di atas, serta informasi terkait, peneliti menganalisis bahwa ada beberapa masalah di balik pembangunan reklamasi pantai seruni. Pengelolaan yang didasari dengan fungsi manajemen agar ketimpangan dan keselarasan antara pembangunan insfrakstruktur dan pelestarian keanekaragaman hayati laut dan sekitar wilayah reklamasi seharusnya membuat tujuan *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan dapat dirasakan dan berlanjut bukan untuk sekedar pelaksanaan pembangunan yang berjalan di tempat. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian yang mendalam dengan mengambil judul : “Pengelolaan Reklamasi Pantai Seruni Berbasis *Sustainable Development* di Kabupaten Bantaeng”

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana pengelolaan reklamasi pantai seruni di Kabupaten Bantaeng dengan perspektif *sustainable development* ?

I.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan reklamasi Pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng dengan perspektif *sustainable development* menggunakan teori POLC (*planning, organizing, leading, controlling*)

I.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai landasan teoritis yang berguna dan memberikan pengetahuan dan wawasan bagi civitas akademika terkhusus mengenai pengelolaan suatu wilayah yang berbasis pada *sustainable development* dalam tata kelola dan manajemen suatu wilayah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi serta masukan kepada pemerintah serta penyelenggara dan juga organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang pengawasan kebijakan dan pengelolaan suatu wilayah sehingga proses pembangunan selalu menjadi garda terdepan bagi masyarakat dan juga terjaganya ekosistem.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1. Konsep Manajemen

II.1.1 Pengertian Manajemen

Secara *etimologis*, istilah manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti “tangan”, dalam bahasa Italia *maneggiare* berarti “mengendalikan”, dan bahasa Prancis *management* yang berarti “seni melaksanakan dan mengatur”. Secara umum, manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan untuk menjawab segala hal mengenai manajemen yang diakronimkan 5 W + 1 H dalam Hasibuan (2008) sebagai berikut :

a. *WHAT* (Apa yang diatur)

Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *men. money, methods, materials, machines, and market*, yang disingkat dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen itu

b. *WHY* (Mengapa harus diatur).

Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.

c. *WHO* (Siapa yang mengatur)

Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui instruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya.

d. *WHEN* (Kapan harus diatur)

Waktu untuk mengatur ialah pada saat proses management digunakan dalam segala bentuk kegiatan dalam menjalankan suatu organisasi

e. *WHERE* (Di mana harus diatur)

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan "alat" dan "wadah" (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Tegasnya, pengaturan hanya dapat dilakukan di dalam suatu organisasi (wadah/tempat). Sebab dalam wadah (organisasi) inilah tempat kerja sama, proses manajemen, pembagian kerja, koordinasi, dan integrasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai

f. *HOW* (Bagaimana mengaturnya)

Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian = *planning, organizing, directing, and controlling*).

Menurut James A.F Stoner (1996) menjelaskan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar tercapat tujuan yang telah ditetapkan. Dalam Hasibuan (2008:2-3) terdapat definisi yang dikemukakan para ahli mengenai manajemen sebagai berikut :

1. Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. "Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu".
2. Andrew F. Sikula. "*Management in general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decision making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an efficient creation of some product or service*". Manajemen pada umumnya dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh setiap organisasi dengan tujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan sehingga akan dihasilkan suatu produk atau jasa secara efisien.
3. G.R. Terry. "*Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling performed to determine and accomplish stated objectives by the use of human being and other resources*". Manajemen adalah suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.
4. Harold Koontz dan Cyril O'Donnel. "*Management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the*

manager, as a manager plans, organizes, staffs, direct, and control the activities other people". Manajemen adalah usaha mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain Dengan demikian manajer mengadakan koordinasi atas sejumlah aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, pengarahan, dan pengendalian.

Berdasarkan definisi para ahli di atas, Hasibuan (2008:3) menyimpulkan bahwa :

1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
2. Manajemen merupakan perpaduan antara ilmu dengan seni.
3. Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya (6M).
4. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama dalam suatu organisasi.
5. Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab.
6. Manajemen terdiri dari beberapa fungsi (POSD dan C).
7. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.

II.1.2 Asas Manajemen

Asas Manajemen (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari hasil penelitian dan pengalaman. Asas ini sifatnya permanen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan "intisari" kebenaran- kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut. Asas adalah dasar tetapi bukanlah sesuatu yang absolut atau mutlak.

Artinya, penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.

Asas bukanlah hukum atau dogma, tetapi hanya sebagai hipotesis yang harus diterapkan secara fleksibel, praktis, relevan, dan konsisten. Dengan menggunakan asas-asas manajemen, seorang manajer dapat mengurangi atau menghindari kesalahan-kesalahan dasar dalam menjalankan pekerjaannya, dan kepercayaan pada diri sendiri pun akan semakin besar. Manajer secara beralasan dapat meramalkan hasil-hasil usaha atau kegiatan-kegiatannya. Asas-asas umum manajemen (*general principles of management*), menurut Henry Fayol dalam Hasibuan (2008:10-12) mempunyai 14 asas yang harus dimiliki dan dilakukan yaitu :

1. *Division of work* (asas pembagian kerja)

Asas ini sangat penting, karena adanya *limit factors*, artinya adanya keterbatasan kemampuan manusia dalam mengerjakan semua pekerjaan, yaitu. keterbatasan wakt, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan kemampuan dan keterbatasan perhatian. Keterbatasan ini mengharuskan diadakannya pembagian kerja. Tujuannya untuk memperoleh efisiensi organisasi dan pembagian kerja yang sesuai dengan kebutuhan, baik pada bidang teknis maupun pada bidang kepemimpinan.

2. *Authority and Responsibility* (asas wewenang dan tanggung jawab)

Asas ini perlu pembagian wewenang dan tanggung jawab jawa antara atasan dan bawahan; wewenang harus seimbang dengan tanggung jawab. Hak dan kewajiban menyebabkan interaksi atau komunikasi antara atasan dan bawahan yang baik.

3. *Discipline* (asas disiplin)

Asas ini hendaknya semua perjanjian, peraturan yang telah ditetapkan, dan perintah atasan harus dihormati, dipatuhi, serta dilaksanakan sepenuhnya.

4. *Unity of Command* (asas kesatuan perintah)

Asas ini hendaknya setiap bawahan hanya menerima perintah dari seorang atasan dan bertanggung jawab hanya kepada seorang atasan pula. Tetapi seorang atasan dapat memberi perintah kepada beberapa orang bawahan.

5. *Unity of Direction* (asas kesatuan jurusan atau arah)

Setiap orang (sekelompok) bawahan hanya mempunyai satu rencana, satu tujuan, satu perintah, dan satu atasan, supaya terwujud kesatuan arah, kesatuan gerak, dan kesatuan tindakan menuju sasaran yang sama. *Unity of command* berhubungan dengan karyawan, sedangkan *unity of direction* bersangkutan dengan seluruh perusahaan.

6. *Subordination of Individual Interest into General Interest* (asas kepentingan umum di atas kepentingan pribadi)

Setiap orang dalam organisasi harus mengutamakan kepentingan bersama (organisasi), di atas kepentingan pribadi.

7. *Remuneration of Personnel* (asas pembagian gaji)

Menurut asas ini, hendaknya gaji dan jaminan-jaminan sosial harus adil, wajar, dan seimbang dengan kebutuhan, sehingga memberikan kepuasan yang maksimal baik bagi karyawan maupun manajer.

8. *Centralization* (asas pemusatan wewenang)

Setiap organisasi harus mempunyai pusat wewenang, artinya wewenang itu dipusatkan atau dibagi-bagikan tanpa mengabaikan situasi-situasi khas, yang akan memberikan hasil keseluruhan yang memuaskan. *Centralization* ini sifatnya dalam arti relatif, bukan absolut (mutlak).

9. *Scalar of Chain* (asas hierarki)

Saluran perintah atau wewenang yang mengalir dari atas ke bawah harus merupakan mata rantai vertikal yang jelas, tidak terputus, dan dengan jarak terpendek. Maksudnya perintah harus berjenjang dari jabatan tertinggi ke jabatan ferendah dengan cara yang benurutan.

10. *Order* (asas keteraturan)

Asas ini dibagi atas *material order* dan *social order*, artinya keteraturan dan ketertiban dalam penempatan barang-barang dan karyawan. *Material order* artinya barang-barang atau alat-alat organisasi perusahaan harus ditempatkan pada tempat yang sebenarnya. *Social order* artinya penempatan karyawan harus sesuai dengan keahlian atau bidang spesialisasinya.

11. *Equity* (asas keadilan)

Pemimpin harus berlaku adil terhadap semua karyawan dalam pemberian gaji dan jaminan sosial, pekerjaan dan hukuman. Perlakuan yang adil akan mendorong bawahan mematuhi perintah-perintah atasan dan gairah kerja. Jika tidak adi bawahan akan malas dan cenderung menyepelkan tugas-tugas dan perintah- perintah atasannya.

12. *Initiative* (asas inisiasif)

Menurut asas ini, seorang pimpinan harus memberikan dorongan dan kesempatan kepada bawahannya untuk berinisiatif, dengan memberikan kebebasan agar bawahan secara aktif memikirkan dan menyelesaikan sendiri tugas-tugasnya.

13. *Esprit de Corps* (Asas Kesatuan)

Menurut asas ini, kesatuan kelompok harus dikembangkan dan dibina melalui sistem komunikasi yang baik, sehingga terwujud kekompakan kerja (*team work*) dan timbul keinginan untuk mencapai hasil yang baik.

14. *Stability of Turn-over of Personnel* (asas kestabilan masa jabatan)

Menurut asas ini, pimpinan perusahaan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak terlalu sering, karena akan mengakibatkan ketidakstabilan organisasi, biaya-biaya semakin besar, dan perusahaan tidak mendapat karyawan yang berpengalaman. Pimpinan perusahaan harus berusaha agar setiap karyawan betah bekerja sampai masa pensiunnya.

II.1.3 Fungsi Manajemen

Menurut James F. Stoner dalam Effendi (2015) mengemukakan bahwa ada empat fungsi manajemen untuk pencapaian tujuan organisasi yaitu : *planning, organizing, leading, controlling* (POLC)

1. Perencanaan (*planning*) menunjukkan bahwa para manajer memikirkan tujuan dan kegiatannya sebelum melaksanakannya. Kegiatan mereka biasanya berdasar suatu cara, rencana, atau logika, bukan asal tebak saja.

2. Pengorganisasian (*organization*) berarti para manajer itu mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya bahan yang dimiliki organisasi. Sejauh mana efektifnya suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya yang ada dalam mencapai tujuannya. Tentu saja, dengan makin terpadu dan makin terarahnya pekerjaan akan menghasilkan makin efektifnya organisasi. Mendapatkan koordinasi yang sedemikian itu adalah salah satu tugas manajer.
3. Memimpin (*leading*) menunjukkan bagaimana para manajer mengarahkan dan mempengaruhi bawahannya, menggunakan orang lain untuk melaksanakan tugas tertentu, Dengan menciptakan suasana tepat, mereka membantu bawahannya bekerja sebaik mungkin.
4. Pengendalian (*controlling*) berarti para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa organisasi bergerak dalam arah tujuan. Apabila salah satu bagian dari organisasi menuju arah yang salah, para manajer berusaha untuk mencari sebabnya dan kemudian mengarahkannya kembali ke tujuan yang benar.

Senada dengan uraian di atas, Effendi (2015) pada prinsipnya bahwa fungsi- fungsi manajemen yang telah dikemukakan oleh para penulis secara umum mengandung unsur sebagai berikut :

- a. Perencanaan (*Planning*)

Merupakan suatu kegiatan membuat tujuan organisasi dan diikuti dengan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan menyiratkan bahwa manajer terlebih dahulu memikirkan dengan matang tujuan dan tindakannya. Biasanya tindakan

manajer itu berdasarkan atas metode, rencana atau logika tertentu, bukan suatu firasat.

b. Pengorganisasian (*Organizing*)

Merupakan suatu kegiatan pengaturan pada sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi untuk menjalankan rencana yang telah ditetapkan serta menggapai tujuan organisasi. Pengorganisasian berarti bahwa manajer mengoordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya bahan yang dimiliki organisasi bersangkutan agar pekerjaan rapi dan lancar. Keefektifan sebuah organisasi tergantung pada kemampuannya untuk mengerahkan sumber daya guna mencapai tujuannya. Jelasnya makin terpadu dan terkoordinasi tugas-tugas sebuah organisasi, akan semakin efektiflah organisasi itu. Menggapai koordinasi ini adalah bagian dari pekerjaan manajer.

c. Kepemimpinan (*Leading*)

Berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja secara maksimal serta menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, dan dinamis. Kepemimpinan memberikan bagaimana manajer mengarahkan dan memengaruhi para bawahan, bagaimana cara agar orang-orang lain melakukan tugas-tugas yang esensial. Dengan menciptakan suasana yang tepat, manajer membantu para bawahannya untuk bekerja sebaik-baiknya. Kepemimpinan termasuk di dalamnya penggerakan (*actuating*) yaitu melakukan penggerakan dan memberikan motivasi pada bawahan untuk melakukan tugas-tugasnya.

d. Pengendalian (*Controlling*)

Merupakan suatu aktivitas menilai kinerja berdasarkan standar yang telah dibuat untuk kemudian dibuat perubahan atau perbaikan jika diperlukan. Pengendalian berarti bahwa manajer berusaha untuk menjamin bahwa organisasi bergerak ke arah tujuannya. Apabila ada bagian tertentu dari organisasi itu berada pada jalan yang salah atau terjadi penyimpangan, maka manajer berusaha menemukan penyebabnya kemudian memperbaiki atau meluruskan ke jalan yang benar.

II.1.4 New Public Manajemen

Cheema dalam Keban (2014) mengungkapkan 4 fase administrasi publik yang menggambarkan perkembangan paradigma administrasi publik yaitu :

1. *Traditional Public Administration*, yang berorientasi pada hirarki kontinuitas ketidakberpihakan, standarisasi, *legal-rational*, otoritas dan profesionalitas.
2. *Public Management*, yang memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip manajemen termasuk efisiensi dalam pemakaian sumber daya, efektifitas, orientasi pada pelanggan, orientasi pada kekuatan pasar dan lebih sensitive terhadap kepentingan publik. Paradigma ini menyarankan peran sektor swasta yang lebih besar, memperkecil ukuran sektor publik, dan memperkecil domain dari *traditional public administration*.
3. *New Public Management*, yang diarahkan pada prinsip fleksibilitas, pemberdayaan, inovasi dan orientasi pada hasil, *outsourcing*, dan *contracting out*, serta promosi etika profesi dan manajemen dan anggaran berbasis kinerja.

4. *Governance*, yaitu suatu sistem nilai, kebijakan, kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, dan politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Paradigma ini mengutamakan mekanisme dan proses dimana masyarakat dan kelompok dapat mengartikulasikan kepentingan, mediasi berbagai perbedaan dan menjalankan hak dan kewajiban. Pemerintah diharapkan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sementara sektor swasta dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan sedangkan masyarakat madani (*civil society*) menyelenggarakan interaksi sosial dan politik secara sehat. Ketiga aktor ini secara esensi memperkuat interaksi dalam mempromosikan *people centered development*.

Sementara itu Vigoda dalam Keban (2014) *new public management* dipandang sebagai pendekatan dalam administrasi publik yang menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang diperoleh dalam dunia manajemen bisnis dan disiplin yang lain untuk memperbaiki efisiensi, efektifitas dan kinerja pelayanan publik pada birokrasi modern yang mengungkapkan bahwa ada 7 komponen doktrin dalam *new public management* yaitu :

1. Pemanfaatan manajemen profesional dalam sektor publik
2. Penggunaan indikator kinerja
3. Penekanan yang lebih besar pada kontrol *output*
4. Pergeseran perhatian pada unit yang lebih kecil
5. Pergeseran ke kompetisi yang lebih tinggi
6. Penekanan gaya sektor swasta pada sektor manajemen
7. Penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih tinggi dalam penggunaan sumber daya

Menurut Hood dalam Keban (2014) *New Public Management* hanya meliputi 5 doktrin, yaitu :

1. Penerapan deregulasi pada *line* manajemen
2. Konversi unit pelayan publik menjadi organisasi yang berdiri sendiri
3. Penerapan akuntabilitas berdasarkan kinerja terutama melalui kontrak
4. Penerapan mekanisme kompetisi
5. Memperhatikan mekanisme pasar

Dari berbagai doktrin *New Public Management*, Kettel dalam Keban (2014) mengemukakan reformasi manajemen harus diarahkan pada 6 dimensi kunci yaitu *productivity, marketization, service, orientation, decentralization policy, dan performance accountability*.

II.2 Desentralisasi

Desentralisasi ialah pendistribusian atau pelimpahan wewenang kekuasaan kepada daerah dalam rangka menyelenggarakan agenda pembangunan yang diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, desentralisasi dari asal usul bahasa berasal dari bahasa Latin, yaitu “De” atau lepas dan “Centrum” atau pusat. Ini tidak terlepas dari bagaimana daerah atau wilayah mencoba untuk membangun daerahnya masing-masing tanpa ada campur tangan dari pusat, meskipun koordinasi dan interpendensi pelaksana kegiatan dapat menunjang tujuan pembangunan yang bersifat nasional.

Maryanov dalam Tjokroamidjojo (1974:81) mengemukakan tujuan desentralisasi di Indonesia “*the decentralization program in Indonesia is an approach to two significant problems : it is a method for spreading government to all parts of the country; it is a method for accommodating regional differences,*

regional aspirations, and regional demands within the confines of the unitary state". Begitupun yang dikemukakan oleh Sady dalam Tjokroamidjojo (1974:82) tujuan desentralisasi secara umum ialah sebagai berikut :

1. Mengurangi beban pemerintah pusat, dan campur tangan tentang masalah-masalah kecil pada tingkat local. Demikian pula memberikan peluang untuk koordinasi pelaksana pada tingkat local
2. Meningkatkan pengertian rakyat serta dukungan mereka dalam kegiatan usaha pembangunan ekonomi. Demikian pula pada tingkat local, dapat merasakan keuntungan dari para kontribusi kegiatan mereka itu
3. Penyusunan program-program untuk perbaikan social ekonomi pada tingkat local sehingga dapat lebih realistis
4. Melatih rakyat untuk bias mengatur urusannya sendiri (*self government*)
5. Pembinaan kesatuan nasional

Mengacu pada Undang-undang pada pasal 23 UU Otonomi Daerah Tahun 2014 pemerintah daerah diberi kewenangan dalam kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang wilayah kabupaten/kota. Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007, yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 24 Tahun 1992, tentang penataan ruang yang menjelaskan bahwa setiap daerah kabupaten memiliki kewenangan untuk menyusun dan mengatur dalam penyelenggaraan penataan ruang.

II.3 Reklamasi

Reklamasi merupakan subsistem dari sistem pantai, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia pengaturan mengenai reklamasi dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 butir 23 memberikan definisi bahwa reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan social ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase, Dalam pasal 34 menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya . Pada dasarnya, reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan dengan berbagai tujuan adalah sah dan telah dipraktekkan secara luas di seluruh penjuru dunia. Realita tersebut mendorong wilayah yang ada di pinggir pantai untuk terus mencari alternatif baru sebagai tempat untuk menampung kegiatan perkotaan. Namun demikian, Rellua (2013) Jurnal Lex Administratum mengatakan pelaksanaan reklamasi juga wajib menjaga dan memperhatikan beberapa hal seperti keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan pelestarian lingkungan pesisir, serta persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan materil.

Beberapa aturan yang mengatur mengenai reklamasi pantai dikutip dari Rellua (2013) yaitu :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No.27 tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

2. Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa jiwa, raga, harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir dapat diminimalisir.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 merupakan peraturan yang mengatur pembatasan kegiatan manusia termasuk industri yang dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan mutu laut. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 dirancang untuk melindungi mutu laut, yang meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut dengan tujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan rusaknya sumberdaya laut
7. Peraturan Menteri PU No. 40/PRT/M/2007 mengenai pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai

Maskur (2008) dalam tesisnya mengatakan, reklamasi dapat memberikan dampak positif ataupun dampak negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir maupun laut. Dampak tersebut dapat bersifat jangka pendek dan jangka panjang tergantung dari jenis dampak dan kondisi ekosistem serta masyarakat di lokasi reklamasi. Dampak positif kegiatan reklamasi antara lain adalah terjadinya peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir, mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif, penambahan wilayah, perlindungan pantai dari erosi, peningkatan kondisi habitat perairan, penyerapan tenaga kerja dan lain-lain.

Sedangkan dampak negatif dari reklamasi pada lingkungan meliputi dampak fisik seperti perubahan hidro-oseanografi, sedimentasi, peningkatan kekeruhan air, pencemaran laut, peningkatan potensi banjir dan genangan (rob) di wilayah pesisir, rusaknya habitat laut dan ekosistemnya. Selain itu, reklamasi juga akan berdampak pada perubahan sosial ekonomi seperti kesulitan akses publik ke pantai, berkurangnya mata pencaharian. Dengan demikian, luas wilayah kewenangan Pemerintah Daerah menjadi bertambah sehingga memberikan harapan yang prospektif dan merupakan peluang bagi daerah untuk mengatur urusannya sendiri. Agar otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan wilayah pantai, maka perlu adanya komitmen pemerintah daerah bersama masyarakat untuk mengelola kelautan yang berada dalam wilayah kewenangannya secara berkelanjutan. Pengelolaan sumberdaya berkelanjutan adalah pembangunan yang menjamin kesinambungan pemanfaatan sumberdaya baik pada masa kini maupun masa depan. Untuk mencapai tujuan ini, pembangunan harus direncanakan secara bijaksana dengan keterlibatan seluruh stakeholder

II.4 Sustainable development (Pembangunan Berkelanjutan)

II.4.1 Pengertian *Sustainable development* (Pembangunan berkelanjutan)

Santoso (2019) dalam bukunya mengemukakan bahwa telah banyak literatur yang membahas mengenai pembangunan berkelanjutan, bahkan sejak keprihatinan Thomas Robert Malthus dalam esainya tahun 1798 yang menguraikan dilema pertumbuhan penduduk, penduduk miskin urban sampai masalah kesehatan akibat polusi. Literatur pembangunan berkelanjutan terus berkembang hingga saat ini. Maka dari itu, definisi pembangunan berkelanjutan dijelaskan dengan tiga pertanyaan besar yakni : untuk berapa lama, apa yang

harus berkelanjutan, dan apa yang harus menjadi focus dalam pembangunan. *Sustainable development* merupakan konsep pembangunan yang menekankan pada pentingnya menciptakan keseimbangan di antara dimensi pembangunan, seperti ekonomi, sosial dan lingkungan.

Menurut Suryono (2001) Pembangunan merupakan suatu proses kegiatan yang direncanakan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa untuk mencapai peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan pembangunan berkelanjutan menurut Sughandy dalam Marlina dkk (2013:82-83) merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan dengan cara menyeraskan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu ruang wilayah daratan, lautan dan udara sebagai satu kesatuan.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan jangka panjang ke depan dengan fokus prinsip menjaga keberlanjutan dukungan alam pada segala aspek kehidupan manusia

II.4.2 Tujuan dan Target *Sustainable Development* (Pembangunan Berkelanjutan)

Santoso (2019) mengemukakan ada 17 tujuan *sustainable development goals* atau pembangunan berkelanjutan yang diharapkan bisa terwujud pada tahun 2030, diperlukan rincian target pencapaian dan indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalannya. Secara global, panduan *sustainable development* adalah 17 tujuan, 169 target dan 241 indikator. Dengan penyesuaian-penyesuaian, melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017

pembangunan berkelanjutan di Indonesia ditetapkan sebanyak 17 goals dengan 94 Target/Sasaran global dan 319 Indikator Sasaran Nasional.

Adapun 17 tujuan, peneliti dalam penelitian ini hanya akan menganalisis tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan pantai serta ekosistem laut demi menunjang pengelolaan reklamasi pantai seruni dapat berbasis *sustainable development*. Adapun tujuan dan target *sustainable development* menurut Santoso (2019) yaitu :

1. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan. Targetnya yaitu :
 - a. Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh
 - b. Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transporta umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas dan orang tua.
 - c. Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.
 - d. Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.
 - e. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi

kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.

- f. Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan member perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.
- g. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang disabilitas
- h. Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional
- i. Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik resiko bencana di semua lini, sesuai dengan *the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030*.
- j. Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Targetnya yaitu :
 - a. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan khususnya, meningkatkan 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.
 - b. Mencapai tingkat ekonomi yang lebih tinggi melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya
 - c. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.
 - d. Meningkatkan secara progresif ,hingga tahun 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta upaya melepaskan kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi Lingkungan, sesuai dengan Kerangka Kerja Program 10 Tahun tentang Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.
 - e. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak untuk semua perempuan dan laki-laki, termasuk untuk kaum muda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

- f. Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.
- g. Memutuskan tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, memulihkan perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan menggunakan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja untuk setiap bentuknya.
- h. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mendorong pekerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, termasuk pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya
- i. Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
- j. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestic untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua
- k. Meningkatkan bantuan untuk mendukung perdagangan bagi negara berkembang, terutama negara kurang berkembang termasuk melalui *the Enhanced Integrated Framework for Trade Related Technical Assistance* bagi negara kurang berkembang.
- l. Pada tahun 2020, mengembangkan dan mengoperasionalkan strategi global untuk ketenagakerjaan pemuda dan menerapkan *the Global Jobs Pact of the International Labour Organization*

3. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati. Targetnya yaitu :
 - a. Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.
 - b. Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.
 - c. Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lah yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.
 - d. Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan. termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.
 - e. Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat keanekaragaman hayati dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.

- f. Meningkatkan pembagian keuntungan yang adil dan merata dari pemanfaatan sumber daya genetik, dan meningkatkan akses yang tepat terhadap sumber daya tersebut, sesuai kesepakatan internasional.
- g. Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburu dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.
- h. Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasive prioritas.
- i. Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan pengurangan kemiskinan.
- j. Memobilisasi dan meningkatkan sumber daya keuangan secara signifikan dari semua sumber untuk melestarikan dan memanfaatkan keanekaragaman hayati dan ekosistem secara berkelanjutan
- k. Memobilisasi sumber daya penting dari semua sumber dan pada semua tingkatan untuk membiayai pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan memberikan insentif yang memadai bagi negara berkembang untuk memajukan pengelolaannya termasuk untuk pelestarian dan reforestasi
- l. Meningkatkan dukungan global dalam upaya memerangi perburuan dan perdagangan jenis yang dilindungi ,termasuk dengan

meningkatkan kapasitas masyarakat lokal mengejar peluang mata pencaharian yang berkelanjutan.

II.4.3 Pilar Sustainable development (Pembangunan Berkelanjutan)

Menurut Santoso (2019) ada empat pilar pembangunan dalam menunjang tujuan *sustainable development* yaitu: pembangunan manusia (social), ekonomi, lingkungan (lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati), serta hukum dan tata kelola.

1. Pilar Pembangunan Sosial, yang memiliki tujuan yaitu :
 - a. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun
 - b. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
 - c. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
 - d. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua
 - e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
2. Pilar Pembangunan Ekonomi, yang memiliki tujuan yaitu :
 - a. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal , berkelanjutan dan modern untuk semua
 - b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
 - c. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi
 - d. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara

- e. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
3. Pilar pembangunan lingkungan, yang memiliki tujuan yaitu :
- a. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua usia
 - b. Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
 - c. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
 - d. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
 - e. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
 - f. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
4. Pilar pembangunan Hukum dan tata kelola, yang memiliki tujuan yaitu :

Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan Hukum dan Tata Kelola

Pengelompokkan 17 tujuan *Sustainable development* ke dalam empat pilar berdasarkan *focus area* bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan koordinasi pengelolaan untuk mencapainya

II.5 Kerangka Pikir

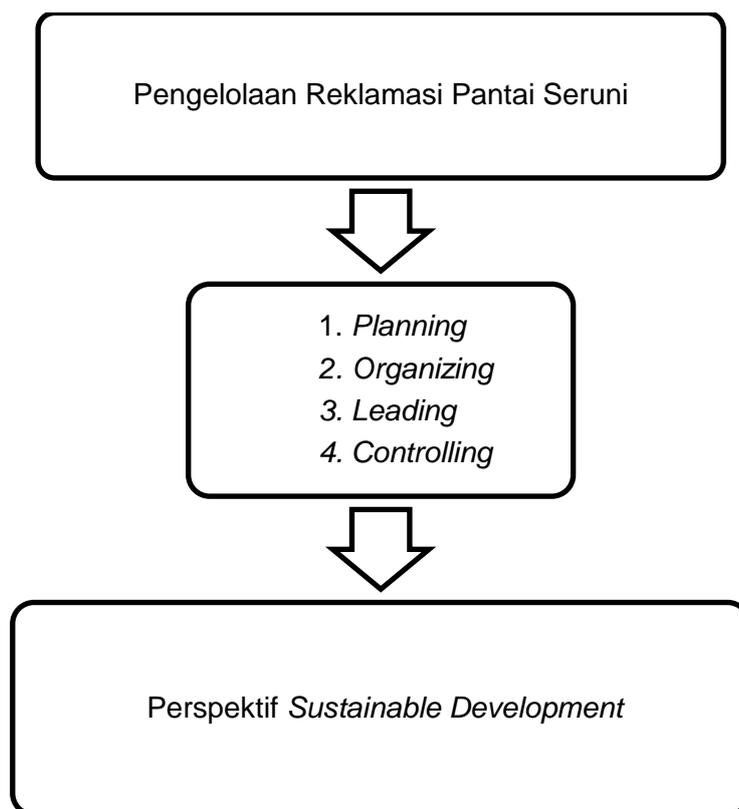
Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2011:60) mengemukakan bahwa “Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Jadi kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan”.

Sustainable Development merupakan perspektif yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis pengelolaan reklamasi pantai Seruni di Kabupaten Bantaeng. Adapun 3 dari 17 tujuan *sustainable development*, peneliti dalam penelitian ini akan menganalisis tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan pantai serta ekosistem laut demi menunjang pengelolaan reklamasi pantai seruni yang berkelanjutan. Aspek social, ekonomi dan lingkungan menjadi sorotan utama peneliti dikarenakan kawasan reklamasi pantai Seruni merupakan suatu wilayah yang dimana interaksi social yang tinggi serta banyaknya pelaku usaha ekonomi yang dimana lingkungan menjadi aspek yang mendukung semua kehidupan yang ada di sana. Adapun tujuan dan target *sustainable development* menurut Santoso (2019) sebagai bagian dari pilar social, ekonomi dan lingkungan diantaranya yaitu :

1. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

3. Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu fungsi manajemen yang dikemukakan oleh James A.F Stoner dalam Effendi (2015) yaitu POLC (*Planning, Organizing, Leading, Controlling*). Adapun Kerangka Pikir peneliti dalam penelitian ini adalah :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir